

## STRATEGI DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN LUWU UTARA

Ina Ina<sup>1\*</sup>, Andi Rosdianti Razak<sup>2</sup>, Nur Khaerah<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the government's strategy in empowering small and medium enterprises in North Luwu Regency. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The results of the research show that in the process of empowering SMEs with indicators of goals, environment, direction, action and learning as well as supporting and inhibiting factors, the government in Luwu Uara Regency has attempted to empower SMEs in North Luwu. With the aim of improving people's welfare as well as being the driving force of the national economy. Through internal and external environmental factors, namely cooperation and support between the government and business actors, the DP2KUKM government then provides direction, namely by conducting outreach among fellow policy implementing actors and between community policy implementers supported by financial institutions*

**Keywords:** strategy, economy, community empowerment, msme

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil menengah di Kabupaten Luwu Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan UKM dengan indikator tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan dan pembelajaran serta faktor pendukung dan faktor penghambat maka pemerintah di Kabupaten Luwu Uara telah berupaya melakukan pemberdayaan UKM di Luwu Utara. Dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Melalui faktor lingkungan internal dan eksternal yaitu kerjasama dan dukungan antara pemerintah dan pelaku usaha yang kemudian pemerintah DP2KUKM memberikan arahan yaitu dengan melakukan sosialisasi antara sesama aktor pelaksana kebijakan dan antara pelaksana kebijakan masyarakat yang didukung oleh lembaga keuangan

**Kata kunci:** strategi, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, umkm

---

\* ina@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sangatlah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Rahayu, 2018).

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, selain berperan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti tahun 1998 sampai 2008 lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, bahkan berhenti aktivitasnya. Akan tetapi, sektor UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Sektor UKM berperan sebagai

salah satu alternatif lapangan kerja baru, selain berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pascakrisis, yaitu pada saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Bahkan, dewasa ini sektor UKM telah berkontribusi besar, baik pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. (Suhermanto, 2020).

Dalam Suparyanto dan Rosad (2020) menjelaskan usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang usaha yang menopang perekonomian Indonesia. Selama beberapa tahun UKM mampu membuktikan untuk bertahan di krisis ekonomi yang telah terjadi. LPPi dan BI pada tahun 2015 menunjukkan bahwa selama beberapa tahun ini UKM telah mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57% sampai 60% serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 97% dari total keseluruhan tenaga kerja Nasional. Salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia adalah Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam Suparyanto dan Rosad (2020) juga menjelaskan di Kecamatan Masamba di Kabupaten Luwu Utara

terdapat 2.910 UKM (2022). Hal tersebut seharusnya pengacu bagi pelaku UKM untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan modal kerjanya agar dapat meningkatkan modal jualanya, semakin banyak pesaing berarti semakin besar keringinan pelaku untuk memikirkan cara agar dapat meningkatkan kualitas usahanya, sehingga diminati konsumen dan semakin membuat profit penjualan semakin meningkat namun realitas yang terjadi di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, pelaku UKM masih banyak yang tidak mengetahui tingkat penjualanya dan tidak mengetahui dalam penggunaan modal kerja dapat berpengaruh terhadap peningkatan profit, meskipun begitu pelaku UKM teteap menjalankan usahanya untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM) di Luwu Utara memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil menengah agar dapat memulai usaha baru.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

(DP2KUKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan ekonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Di mana pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 10 berbunyi: Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

UKM merupakan salah satu komponen penting perekonomian suatu negara atau daerah khususnya di Kabupaten Luwu Utara merupakan Kabupaten terluas di Sulawesi Selatan yakni 7.502,58 km persegi, Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 15 kecamatan. Pada tahun 2020 jumlah UKM di Kabupaten Luwu Utara mengalami kenaikan hingga mencapai 13.200 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 18.685. melihat potensi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dituntut untuk terus memberdayakan UKM melalui program pembinaan, manajemen, memberikan bantuan baik dibidang pemasaran juga permodalan agar UKM ini nantinya tidak hanya berkembang namun dapat tumbuh menjadi usaha yang mandiri (Suparyanto, 2015; & Rosad 2020).

Selain penting, pengembangan UKM oleh Pemerintah juga sangat dibutuhkan, kemajuan UKM juga ditentukan oleh dukungan serta bantuan

yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mengatur struktur ekonomi kerakyatan yang berlandaskan keadilan. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM) yang bertanggungjawab dalam pengembangan UKM.

Pemberdayaan UKM telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk memperhatikan UKM di daerahnya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM) untuk melindungi UKM di Kabupaten Luwu Utara adalah dengan membangun kualitas UKM yang baik dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuan berupa uang. Selain itu juga, memberikan peluang kepada pelaku UKM untuk masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara.

Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan upaya kinerja melalui kegiatan pemberdayaan UKM, agar dapat menghasilkan produk – produk yang berdaya saing tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Persamaan Suhermanto (2020), Damayanti

(2018), Darmawan (2020), sama-sama meneliti pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM), tetapi memiliki perbedaan yaitu jika Suhermanto (2020) hasil penelitiannya memiliki 3 fase dalam pemberdayaan UKM, Darmayanti (2018) hasil penelitiannya yaitu UKM berpedoman pada peraturan Perundang-Undang Nasional, Dicky Darmawan (2020) hasil penelitiannya yaitu pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sedangkan Nur Ifra Khumaera (2020) berbeda dari ke tiga dari penelitian di atas karena Nur Ifra Khumaera meneliti strategi pengembangan UKM.

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" yang berarti sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

Menurut Tjiptono (2011), strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Ada juga Geoff Mulgan yang menyatakan "*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*". Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009 :19).

Dikutip dari Noor (2011) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat

*people-centered, participatory*. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat di kaji dari 3 aspek: Pertama, *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

## METODE

Penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM), di Kabupaten Luwu Utara. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karna peneliti ingin mengetahui lebih spesifik tentang Pemberdayaan Pelaku UKM pada Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM), di Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data-data, gambaran,

perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk angka melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis/menyeluruh.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penggambaran suatu fenomena dengan kata - kata bukan dengan angka – angka. Data primer, data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang terdiri dari beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku bacaan dan Internet.

Data yang telah didapatkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Adapun tahapan teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah, sebagai berikut: Pengumpulan data Penyajian Data menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya pengembangan dengan tujuan pemberdayaan Usaha kecil menengah yang terdapat pada

Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM) Kabupaten Luwu Utara mempunyai tanggung jawab teknis bagi perkembangan UKM. Strategi perkuatan, pengembangan, dan pemberdayaan. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan beberapa program tersebut, diharapkan eksistensi sektor UKM di Kabupaten Luwu Utara yang akan dikembangkan. Strategi pengembangan dunia usaha Menurut Geoff Mulgan ada 5 indikator yakni Tujuan, Lingkungan, Pengarahan, tindakan dan pembelajaran sebagai berikut:

### **Tujuan (*Purposes*)**

Tujuan dari pemberdayaan UKM adalah salah satu model perkembangan Kabupaten yang dirancang dari pemerintah pusat sesuai arah kebijakan strategis perkembangan Kabupaten maupun Nasional. Karena sektor UKM memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, karena sebagian besar dilaksanakan di masyarakat yang berupa arah yang diinginkan oleh pemerintah daerah dengan memaksimalkan kemampuan yang ada guna penguatan para pelaku UKM.

Pemberdayaan UKM yang dimaksud disini adalah upaya dalam membangun sektor UKM di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Lingkungan merupakan ruang di mana dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Lingkungan juga meliputi aspek perubahan pada kondisi lingkungan sekitar dan juga perubahan pada kesehatan manusia yang juga turut mempengaruhi strategi yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara guna penguatan para pelaku UKM.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dan observasi ini maka pada indikator penerapan lingkungan dengan dukungan faktor internal lingkungan dan faktor eksternal dalam pemberdayaan UKM pada Kabupaten Luwu Utara yaitu dengan pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh DP2KUKM yang bisa mendampingi pelaku usaha untuk membina usaha yang ramah lingkungan, mengelola usaha dengan menggunakan sistem lingkungan. Serta memberikan inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dan perluasan area pemasaran dengan

penerapan dengan memperhatikan psikologis lingkungan agar menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah sebagai agen pemberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

Pengarahan merupakan petunjuk atau instruksi atau arahan yang diberikan oleh pemberi arahan (dalam hal ini adalah DP2KUKM) yang meliputi koordinasi, komunikasi dan motivasi yang baik dan benar, untuk melakukan suatu perintah resmi yang berasal dari pimpinan, guna penguatan para pelaku UKM.

Berdasarkan hasil penelitian maka dengan indikator pengarahan pada pemberdayaan ukm yang dilakukan oleh DP2UKM yaitu dengan dilakukan sosialisasi antara sesama aktor pelaksana kebijakan dan antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha dengan pemerintah setempat yang berwenang dalam pemberdayaan UKM ini yaitu DP2KUKM itu sendiri. Kemudian DP2KUKM melakukan pendekatan komunikasi sebagai bentuk koordinasi antara pelaku usaha dengan pemerintah setempat.

Upaya yang dilakukan guna mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi atau perangkat

pemerintah. Di mana pada tindakan meliputi situasi di eksternal, dan didukung dengan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara, sehingga nantinya dapat diambil suatu keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara guna penguatan para pelaku UKM.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap DP2KUKM dalam memberdayakan UKM di Kabupaten Luwu Utaran dengan tindakan dalam hal ini yang dilakukan oleh DP2KUKM Lutra adalah yaitu dengan penyediaan sarana dan sarana berdasarkan dijelaskan pada tahap tujuan diatas kemudian dengan memberikan binaan dengan penyediaan fasilitas berupa tempat bagi para pelaku ukm serta membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengembangan UKM dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perangkat pemerintahan untuk menentukan strategi maupun merumuskan kebijakan yang di mana di dalamnya meliputi pemahaman dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pelaku usaha.



Berdasarkan hasil penelitian dengan indikator pembelajaran maka yang dilakukan aparat DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara adalah dengan mendatangi tempat para pelaku UKM yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dalam kegiatan ini aparatur dari DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara bertemu langsung dan saling bertukar informasi dengan tujuan pembelajaran berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai masalah industri kecil dengan para pengusaha kecil. Kemudian dengan memberikan materi kepada para pelaku usaha oleh aparat DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara berupa pengembangan ragam produk, peningkatan kualitas produk, manajemen permodalan dan pemasaran produk.

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan UKM itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh DP2KUKM. Adapun faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UKM sebagai berikut:

### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan.

Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya pelayanan kesehatan, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah dan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara dalam pemberdayaan UKM maka faktor pendukung dalam penerapan strategi pengembangan Usaha kecil menengah adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara, para pengusaha yang memiliki usaha, dan pihak lain yang mendukung. Faktor lainnya adalah semangat dan kemauan dari para pelaku usaha untuk saling bertukar informasi sehingga memudahkan aparat DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan tugasnya yakni membantu para pengusaha kecil menengah. Kemudian faktor pendukung lainnya yaitu dengan kesediaan masyarakat untuk menerima pemberdayaan dan adanya kepercayaan dari pemerintah untuk mengembangkan pemberdayaan dalam artian bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dalam membantu dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh DP2KUKM tersebut.

## **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Hambatan adalah usaha yang muncul dari dalam dan bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan secara tidak konsepsional.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan maka faktor penghambat dalam proses pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara terhadap pelaku usaha adalah minimnya pengetahuan dalam bidang teknologi. Sebagian pelaku usaha UKM pada Kabupaten Luwu Utara dalam proses pemasaran, beberapa pelaku usaha pernah mencoba menggunakan media online tetapi hal itu tidak berlangsung lama, dengan alasan penggunaan yang rumit, waktu yang tidak efisien dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi tersebut. Kemudian kendala dalam pemberdayaan UKM yaitu minimnya pengetahuan manajemen pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh pelaku usaha, pemilik usaha terkendala pada sistem manajemen perusahaan, dalam pengelolaan UKM masih sangat

tradisional. Maka ini bisa menjadi tugas dan evaluasi daripada DP2KUKM dalam meningkatkan pengetahuan kepada pelaku usaha dalam bidang manajemen pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2021) yang menyatakan bahwa Upaya pemerintah dalam penguatan potensi usaha dilakukan dibeberapa bidang yakni bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Adapun upaya pemerintah dalam perlindungan usaha adalah dengan menekan persaingan usaha, membangun kualitas UKM baik dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuan hibah serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan kewirausahaan dan memberikan peluang kepada pelaku UKM untuk masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara. Beberapa faktor yang menjadi pendukung pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara yakni SDM, bantuan modal dan peralatan, kekayaan SDA, serta kebijakan pemerintah. Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara, yakni keterbatasan anggaran,

SDM, pandemi covid-19 serta sulitnya akses jalan ke lokasi- lokasi terpencil.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas tentang Strategi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Luwu Utara, maka adapun kesimpulan yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM) di Kabupaten Luwu Utara telah memberikan pembinaan, mataeri, arahan, sarana dan prasarana kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga pelaku UKM dapat berkembang dan dapat bersaing dengan produk-produk berdaya saing tinggi. Strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilaksanakan oleh DP2KUKM ini terdapat faktor pendukung, terjalannya kerjasama yang baik antara DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara, para pengusaha yang memiliki usaha, dan pihak lain yang mendukung dan peran serta masyarakat (pelaku usaha) dalam pemberdayaan. Serta faktor penghambat, minimnya pengetahuan pelaku usaha dibidang teknologi dan minimnya pengetahuan

dalam manajemen pengelolaan keuangan pada pelaku usaha.

## REFERENSI

- Anisa. (2022). *Efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pasca banjir bandang di kec. masamba (studi pada UKM)*.
- Darmayanti, A. (2022). *Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM), di Kabupaten Luwu Utara* (Skripsi, IAIN Palopo, Palopo).
- Husna, A. (2018). *Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang* (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung).
- Rahayu, A. S (2018). *Pengantar Pemerintah Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Darmawan, D. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM di Kabupaten Barru. Kaos GL Dergisi*, 8(75), pp. 147–150.
- Karinayah, D. (2018). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) Di Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya).
- Endah, K. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.*, 6(1), pp. 135–143.
- Ferdian, A. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan UKM Di Desa Pompaniki. Jurnal I La Galigo*, 2(2), p. 60.

- Fadilah et al., (2020). Strategi UKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid-19 Pada Saat New Normal. *OECOMICUS: Journal of Economics*, 5(1), pp. 47-62.
- Christian, A. J. (2009), *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Terdampak Pandemi Coronavirus Disease (covid-19)* (Skripsi, UNIKOM, Bandung).
- Astri, A. (2022). Peran Sentra Bisnis Masamba (SBM) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Bencana Banjir (Studi Kasus di Pasca Bencana Banjir (Studi Kasus di Kecamatan Masamba) (Skripsi, IAIN Palopo, Palopo).
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), p. 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Nurlela et al., (2018). *Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Kabupaten Luwu Utara. KOLABORASI: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), pp. 100-116.
- Khumaera, N. I. (2020). Strategi Pengembangan UKM Berbasis Pangan Lokal di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. *Agridevina: Berkala Ilmiah Agribisnis*, 9(1).
- Rahmawati. (2021). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Buntu* (Skripsi, IAIN Palopo, Palopo).
- Muliana, R. (2020). *Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Program Badan Milik Desa (Study Kasus Kredit Sahabat (Krabat) Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram).
- Suhermanto. (2020). *Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros. Molecules*, 2(1), pp. 1–12.
- Halidah. (2022). *Pengaruh Penggunaan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada UKM Di Kecamatan Masamba* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo).
- Ontorael, R. (2017). *Analisis Pengaruh Faktor Lingkungan Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm), Makanan Dan Minuman Di Kota Batu, Jawa Timur)* (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang).
- Wahyuni. (2018). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar).